



**Judul** : RAPBN 2018 Tunggu Densus Tipikor - DPR Menanti Hasil Rapat Terbatas Kabinet Kerja  
**Tanggal** : Selasa, 24 Oktober 2017  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

# RAPBN 2018 Tunggu Densus Tipikor

## DPR Menanti Hasil Rapat Terbatas Kabinet Kerja

JAKARTA, KOMPAS — Pengambilan keputusan tingkat pertama Badan Anggaran DPR dan pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 ditunda sehari. DPR masih menunggu kepastian pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri.

Rapat kerja untuk menyetujui RAPBN 2018 seharusnya diadakan Senin (23/10) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Namun, rapat diundur sampai Selasa (24/10) karena Komisi III, Komisi I, dan Komisi VI DPR belum menyampaikan laporan hasil pembahasan anggaran dengan mitra kerjanya ke Banggar.

Ketua Panitia Kerja Pemerintah Pusat RAPBN 2018 Banggar DPR Said Abdullah, kemarin, mengatakan, penundaan rapat pengambilan keputusan RAPBN 2018 di Banggar DPR salah satunya karena masih ada pembahasan seputar pembentukan Densus Tipikor Kepolisian Negara RI yang belum selesai di-

bahas di Komisi III DPR.

"Nomenklatur dan strukturnya (densus) harus jelas. Kalau tidak, anggaran tidak bisa keluar. Kalau di komisi sudah disetujui, Banggar akan setuju juga. Namun, proses di Komisi III ternyata belum rampung," kata Said.

Adapun keterlambatan penyampaian laporan dari Komisi III terjadi karena belum ada lampu hijau dari Presiden Joko Widodo seputar usulan pembentukan Densus Tipikor. Pemerintah sendiri baru akan membahas rencana pembentukan Densus Tipikor dalam rapat terbatas Kabinet Kerja, Selasa.

Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soe-

satyo mengatakan, setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Komisi III akan mengadakan rapat gabungan dengan Kepala Polri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK, salah satunya untuk membahas Densus Tipikor. Setelah itu, Komisi III akan rapat internal untuk memutuskan alokasi anggaran untuk Densus Tipikor dan beberapa mitra kerja lainnya.

Terkait dinamika internal komisi, Bambang mengatakan, pada prinsipnya semua anggota Komisi III menyetujui pembentukan Densus Tipikor dan setuju memberikan anggaran sesuai yang diajukan.

"Nanti dilakukan bertahap (tahun jamak), jadi yang kami bahas dan setuju sekitar Rp 800 miliar, tidak sepenuhnya Rp 2,6 triliun," kata Bambang.

Ide pembentukan Densus Tipikor awalnya dicetuskan oleh Komisi III dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada Senin (17/7). Usulan itu muncul ketika Panitia

Angket DPR menyelidiki kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### Menuai polemik

Pengajar hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, yang dihubungi dari Jakarta, mengatakan, Densus Tipikor tidak bisa seperti KPK yang memiliki undang-undang dengan berbagai kewenangan khususnya. Menurut dia, pembentukan Densus Tipikor lebih baik diprioritaskan untuk pemberantasan korupsi di lingkungan kepolisian.

Sementara itu, pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, menyatakan, legalitas pembentukan Densus Tipikor dapat melalui Undang-Undang Polri. Pembentukan Densus Tipikor dinilai sebagai bagian reformasi kelembagaan Direktorat Tipikor Badan Reserse Kriminal Polri.

"Pembentukannya sebaiknya lebih kepada niat memerangi korupsi yang kian masif," ujar Indriyanto. (AGE/IAN)